



KETERLIBATAN VETERAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK PARTISIPATIF: PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE

Veterans' Involvement in Participatory Public Policy: A Collaborative Governance Perspective

Tina Trisarana Andriani Silondae
Maudhy Satyadharna
Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Tenggara
maudhymaudhy@gmail.com

ABSTRAK: Kebijakan publik partisipatif menjadi pendekatan penting dalam tata kelola pemerintahan modern, khususnya dalam menjawab kompleksitas persoalan kebangsaan di era demokrasi dan disrupsi sosial. Salah satu aktor yang selama ini belum optimal dilibatkan secara substantif dalam kebijakan publik adalah veteran yang tergabung dalam organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Padahal, veteran memiliki modal sosial, legitimasi moral, serta pengalaman historis yang strategis dalam penguatan nilai nasionalisme dan kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan veteran dalam kebijakan publik partisipatif dengan menggunakan perspektif collaborative governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada Bulan November 2025 di Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan veteran dalam kebijakan publik masih bersifat simbolik dan belum terintegrasi secara sistematis dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dari perspektif collaborative governance, terdapat peluang besar untuk memperkuat peran veteran sebagai aktor kolaboratif melalui skema kemitraan pemerintah–masyarakat–organisasi veteran. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemosisian veteran bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai co-creator kebijakan publik partisipatif yang berorientasi pada penguatan nasionalisme dan ketahanan ideologi bangsa.

Kata kunci: Collaborative Governance, Kebijakan Publik, Veteran

ABSTRACT: Participatory public policy is an important approach in modern governance, particularly in addressing the complexity of national issues in the era of democracy and social disruption. One actor that has not been optimally substantively involved in public policy is the veteran who are members of the Legion of Veterans of the Republic of Indonesia (LVRI). Veterans possess social capital, moral legitimacy, and strategic historical experience in strengthening nationalism and national values. This study aims to analyze veterans' involvement in participatory public policy using a collaborative governance perspective. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The research was conducted in November 2025 in Kendari. The results show that veterans' involvement in public policy is still symbolic and has not been systematically integrated into the process of policy formulation, implementation, and evaluation. From a collaborative governance perspective, there is a significant opportunity to strengthen the role of veterans as collaborative actors through a government-community-veterans organization partnership scheme. The novelty of this research lies in positioning veterans not only as policy recipients, but as co-creators of participatory public policy oriented towards strengthening nationalism and the resilience of the nation's ideology.

Keywords: Collaborative Governance, Public Policy, Veterans

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang inklusif mendorong perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kebijakan publik (Muhammad et al., 2023; Nasyirudin, 2025). Pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai aktor tunggal dalam proses kebijakan, melainkan sebagai bagian dari jaringan aktor yang melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas strategis lainnya (Kuswandro, 2024; Noor et al., 2022; Tuanaya & Latuconsina, 2025). Dalam hal ini, kebijakan publik partisipatif menjadi pendekatan yang semakin relevan untuk meningkatkan legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan (Judijanto et al., 2023; Nasution et al., 2025).

Di tengah dinamika sosial-politik dan tantangan globalisasi, Indonesia menghadapi persoalan serius terkait luntarnya nilai nasionalisme, meningkatnya polarisasi sosial, serta melemahnya kesadaran kebangsaan di kalangan generasi muda (Farhati, 2025; Latuheru & Zarkasih, 2025; Purba, 2025).

Fenomena ini diperkuat oleh arus informasi digital yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan keindonesiaan (Agustinova & Miskawi, 2025; Hidayat, 2025). Oleh karena itu, diperlukan aktor-aktor kebijakan yang memiliki legitimasi moral dan historis untuk memperkuat nilai kebangsaan dalam kebijakan publik (Priyanto, 2025; Suriani et al., 2025; Winarno, 2016).

Veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) merupakan kelompok strategis yang memiliki pengalaman historis, nilai juang, serta keteladanan moral (Kosasih & Basuki, 2025; Satyadharma & Erfain, 2022). Namun, dalam praktik kebijakan publik, veteran seringkali hanya diposisikan sebagai simbol seremonial atau penerima manfaat kebijakan kesejahteraan, bukan sebagai aktor yang dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan (Satyadharma & Erfain, 2022).



Gambar 1 LVRI Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Kegiatan HUT LVRI Tahun 2024
Sumber : DPD LVRI Sultra (2024)

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keterlibatan veteran dalam kebijakan publik partisipatif dapat memperkuat substansi kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, bela negara, dan pendidikan karakter.

Kebijakan publik partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perumusan agenda, penyusunan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Partisipasi publik dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus memperkuat legitimasi demokratis. Partisipasi dalam kebijakan publik tidak hanya bermakna kehadiran formal masyarakat, tetapi juga keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan (Kusuma, 2024; Mariana, 2015). Oleh karena itu, aktor-aktor masyarakat yang memiliki kapasitas, legitimasi, dan kepentingan strategis perlu diidentifikasi dan diberdayakan (Annisa & Fadli, 2024; Fonataba, 2025).

Collaborative governance merupakan model tata kelola yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan publik (Wulandjani et al., 2025). Ansell dan Gash (Afrisal et al., 2022) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang formal, konsensus, dan deliberatif.

Model ini menekankan beberapa elemen kunci, yaitu: (1) keterlibatan aktor lintas sektor; (2) proses dialog dan deliberasi; (3) kepercayaan dan komitmen bersama; serta (4) tujuan kolektif yang disepakati.

Dalam perspektif kebijakan publik partisipatif, *collaborative governance* memberikan kerangka analisis yang kuat untuk melihat peran aktor masyarakat, termasuk veteran (Clark, 2021; Doberstein, 2016; Islamy H., 2018).

Dengan menggunakan perspektif *collaborative governance*, penelitian ini menganalisis bagaimana peran veteran dapat diintegrasikan secara lebih sistematis dalam tata kelola kebijakan publik.

METODA

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena keterlibatan veteran di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kebijakan publik partisipatif serta dinamika kolaborasi yang terjadi (Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan selama sebulan yaitu Bulan November 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap regulasi, program kebijakan, serta dokumen DPD LVRI Sulawesi Tenggara. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Keterlibatan Veteran dalam Kebijakan Publik

Keterlibatan veteran yang masih bersifat terbatas dan simbolik menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap jasa veteran dan praktik partisipasi mereka dalam proses kebijakan publik (Sentanu, 2024)



Gambar 2 Keterlibatan Veteran dalam Harvetnas Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber : DPD LVRI Sultra (2025)

Pelibatan veteran dalam kegiatan seremonial, sosialisasi nilai kebangsaan, serta peringatan hari nasional mencerminkan pola partisipasi tokenistic, di mana kehadiran veteran lebih berfungsi sebagai simbol legitimasi moral negara daripada sebagai aktor kebijakan yang substantif (Susilawati, 2024).

Dalam perspektif partisipasi publik, kondisi ini menempatkan veteran pada level konsultatif yang pasif, bukan pada tahap partisipasi aktif yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan pengambilan keputusan bersama. Padahal, veteran memiliki pengalaman historis, kedisiplinan, serta komitmen ideologis yang dapat menjadi sumber pengetahuan kebijakan berbasis nilai kebangsaan (Satyadharma, 2024; Satyadharma & Erfain, 2022; Silondae et al., 2025).



Gambar 3 LVRI Sultra membawakan materi kebangsaan pada Paskibraka Tingkat Provinsi
Sumber : DPD LVRI Sultra (2025)

Ketidakterlibatan veteran dalam tahapan perencanaan dan evaluasi kebijakan berpotensi mengurangi kualitas kebijakan publik, terutama dalam aspek internalisasi nilai nasionalisme dan ketahanan sosial.

Selain itu, keterbatasan peran veteran juga mengindikasikan belum adanya desain kebijakan yang secara sistematis mengakomodasi partisipasi kelompok strategis non-pemerintah (Mirdad et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari pelibatan simbolik menuju partisipasi bermakna (*meaningful participation*) agar veteran tidak hanya menjadi objek representasi sejarah, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembangunan kebijakan publik.

Perspektif Collaborative Governance

Dari perspektif *collaborative governance*, keterlibatan veteran yang belum optimal mencerminkan belum terpenuhinya prinsip-prinsip utama kolaborasi, seperti kesetaraan aktor, dialog deliberatif, dan pengambilan keputusan bersama (Sumarto, 2025). Absennya forum kolaboratif formal antara pemerintah dan veteran menunjukkan lemahnya desain kelembagaan yang mendorong kolaborasi lintas aktor.

Relasi yang masih bersifat hierarkis menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan, sementara veteran hanya berperan sebagai pelengkap kebijakan. Kondisi ini bertentangan dengan esensi *collaborative governance* yang menekankan kemitraan sejajar dan tanggung jawab bersama (Alfiandri et al., 2019). Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya potensi besar untuk penguatan kolaborasi, mengingat veteran memiliki komitmen tinggi terhadap kepentingan publik dan kesiapan untuk terlibat secara aktif.

Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap veteran juga merupakan modal sosial yang signifikan dalam memperkuat legitimasi kebijakan (Wibisana, 2025).

Dalam situasi ini, *collaborative governance* dapat berfungsi sebagai kerangka strategis untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan veteran melalui mekanisme dialog, konsensus, dan pembelajaran bersama (Islamy H., 2018). Dengan demikian, penguatan kolaborasi tidak hanya berorientasi pada efektivitas kebijakan, tetapi juga pada penguatan nilai

demokrasi partisipatif dan kohesi sosial dalam tata kelola publik.

Model Keterlibatan Veteran dalam Kebijakan Publik Partisipatif

Model keterlibatan veteran dalam kebijakan publik partisipatif yang dikembangkan melalui pendekatan *collaborative governance* menegaskan perlunya reposisi peran veteran sebagai co-creator kebijakan.



Gambar 4 Pengibaran Bendera Merah Putih dalam Rangkaian Hari Veteran Nasional Tahun 2025 Tingkat

Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber : DPD LVRI Sutra (2025)

Pembentukan forum kolaboratif pemerintah–veteran menjadi instrumen utama untuk menciptakan ruang dialog yang setara dan berkelanjutan (Sentanu et al., 2023). Pelibatan veteran dalam perumusan agenda kebijakan memungkinkan integrasi perspektif historis dan nilai perjuangan kedalam kebijakan publik yang selama ini cenderung teknokratis.

Penguatan kapasitas veteran sebagai aktor kebijakan, baik melalui peningkatan literasi kebijakan maupun pelatihan partisipatif, menjadi prasyarat agar keterlibatan bersifat substantif dan berdaya guna. Selain itu, integrasi nilai juang veteran dalam substansi kebijakan berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai nasionalisme, solidaritas, dan pengabdian kepada bangsa (Armawi, 2020).

Model ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan dari sisi nilai dan legitimasi sosial, tetapi juga mendorong terciptanya rasa kepemilikan bersama (*shared ownership*) terhadap kebijakan

public khususnya terkait peningkatan rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan (Tamba et al., 2024). Rasa kepemilikan bersama mendorong masyarakat untuk tidak hanya menerima, tetapi juga menjaga dan mengimplementasikan kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kohesi sosial dan identitas kebangsaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan lebih berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu memperkuat karakter kebangsaan dalam praktik tata kelola publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan veteran dalam kebijakan publik partisipatif masih belum optimal dan cenderung bersifat simbolik. Dari perspektif collaborative governance, diperlukan perubahan paradigma dalam memandang veteran sebagai aktor kolaboratif yang memiliki kontribusi strategis dalam kebijakan publik.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya desain kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan veteran secara sistematis dalam proses kebijakan. Saran penelitian ini mendorong agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mengembangkan mekanisme kebijakan yang memungkinkan keterlibatan veteran secara substantif dalam kebijakan publik. Organisasi veteran perlu diperkuat kapasitasnya agar mampu berperan aktif dalam proses kebijakan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi model kolaboratif ini dalam daerah tertentu

PUSTAKA ACUAN

Afrisal, A. F., Haning, M. T., Ibrahim, M. A., & Yunus, M. (2022). Collaborative Governance dalam Pembuatan Kebijakan. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(5), 631–639.
<https://doi.org/10.55129/v11i5.2429>

- Agustinova, D. E., & Miskawi, M. (2025). Pancasila Dan Revolusi Industri 4.0: Menjaga Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Digital. *Jurnal Sangkala*, 4(2), 71–80.
<https://doi.org/10.62734/js.v4i2.596>
- Alfiandri, A., Akbar, D., & Ikhsan, K. (2019). *Collaborative Governance: Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan Dalam Dunia Investasi*. Umrahpress.
- Annisa, Y., & Fadli, M. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemetaan Sosial Ekonomi. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 117–134.
<https://doi.org/10.24014/jmm.v9i1.29265>
- Armawi, A. (2020). *Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional*. UGM Press.
- Clark, J. K. (2021). Public Values And Public Participation: A Case Of Collaborative Governance Of A Planning Process. *The American Review of Public Administration*, 51(3), 199–212.
<https://doi.org/10.1177/0275074020956397>
- Doberstein, C. (2016). Designing Collaborative Governance Decision-Making In Search Of A 'Collaborative Advantage.' *Public Management Review*, 18(6), 819–841.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1045019>
- Farhati, L. D. (2025). Revitalisasi Identitas Nasional di Era Digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5).
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15312>
- Fonataba, J. (2025). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 1(4), 1376–1395.
<https://doi.org/10.63822/vmthgf73>
- Hidayat, N. (2025). Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*,

- 5(1), 105–118.
<https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10183>
- Islamy H., L. O. S. (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Judijanto, L., Damanik, F. H. S., Kusnadi, I. H., Ahmadun, A., & Leuwol, N. V. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1779–1787.
<https://doi.org/PeranPartisipasiMasyarakatDalamProsesPerumusanKebijakanPublikDiEraDesentralisasi>
- Kosasih, U. S., & Basuki. (2025). Sinergi Legiun Veteran Republik Indonesia Dan Pemuda Panca Marga Dalam Penanaman Nilai Nasionalisme Pada Siswa SMPN 2 Cianjur. *Rakat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 26–33.
<https://batuahjurnal.my.id/index.php/rjpkm/article/view/83>
- Kusuma, F. K. (2024). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik Di Era Desentralisasi. *Media Bina Ilmiah*, 18(9), 2505–2514.
<https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/1244>
- Kuswandro, W. E. (2024). *Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society Dan Kepartaian*. Universitas Brawijaya Press.
- Latuheru, S. C., & Zarkasih, K. (2025). Mewujudkan Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(2), 557–565.
<https://doi.org/10.21009/jimd.v24i2.52084>
- Mariana, D. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 216–229.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834.g5509>
- Mirdad, M. A., Bahar, A. A., & Wisnuyana, B. (2025). *Non-Governmental Organization (NGO) Dalam Pandangan Tiga Perspektif: Hubungan Internasional, Kebijakan Publik Dan Antropologi*. Airlangga University Press.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan Publik Dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), 354–368.
<https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/980>
- Nasution, K., Nasution, M. A., Rustiyana, R., Rachim, A., Baskoro, S. E., Reynilda, R., & Kusumawardhani, F. (2025). *Kebijakan Publik Dalam Perspektif Manajemen Modern: Inovasi, Tata Kelola, Dan Akuntabilitas*. Star Digital Publishing.
- Nasyirudin, M. (2025). *Sosiologi Pemerintahan*. CV Eureka Media Aksara.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik*. Bildung.
- Priyanto, H. (2025). *Analisis Kebijakan Publik: Dasar Dan Implementasi*. Academia Publication.
- Purba, G. H. (2025). Dampak Isu Globalisasi Terhadap Bangsa Dan Karakter Indonesia Sesuai Pendidikan Kewarganegaraan. *At-Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 14–25.
<https://ejurnal.iaiqh.ac.id/index.php/at-tadib/article/view/190>
- Satyadharna, M. (2024). Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dalam Mensosialisasikan Jiwa, Semangat dan Nilai Juang 1945 (JSN45). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(1), 125–136.
<https://doi.org/10.29103/jspm.v5i1.15350>
- Satyadharna, M., & Erfain. (2022). Peran Veteran dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme Pada Masyarakat: Studi pada DPD LVRI Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 117–127.
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.85>
- Sentanu, I. G. E. P. S. (2024). *Dinamika Governance: Teori, Praktek, Dan*



- Implikasi Kebijakan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sentanu, I. G. E. P. S., Tirani, Y. A., & Pradono, G. A. S. (2023). *Kolaborasi dan Analisis Stakeholder: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Silondae, T. T. A., Satyadharma, M., & Safitri, T. N. (2025). Veteran RI sebagai Sumber Belajar Sejarah (Suatu Sumbangsih Pemikiran bagi Dunia Pendidikan). *Kandole (Kajian Dan Analisis Multidisplin Layanan Edukasi)*, 1(2). <https://journal.baktinusantarasultra.org/kandole/article/view/13>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarto, H. S. (2025). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suriani, R., Saputra, E., Sintha, M., Aprillina, I., Winarti, W., Apriani, G., & Siregar, L. P. (2025). *Hukum Kebijakan Publik di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Susilawati, E. (2024). Meningkatkan Civic Engagement Mahasiswa Melalui Literasi Digital. In *Kearifan Lokal Pancasila, Sejarah, Dan Budaya Bangsa* (p. 19).
- Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila Sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146–162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573>
- Tuanaya, W., & Latuconsina, N. (2025). *Kebijakan Pemerintahan*. Penerbit KBM Indonesia.
- Wibisana, H. (2025). Veteran Perang di Tangerang Sampaikan Pesan Menyentuh lewat Menteri PPPA. *Banten Hits*. <https://bantenhits.com/2025/12/19/veteran-perang-di-tangerang-sampaikan-pesan-menyentuh-lewat-menteri-pppa/>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo.
- Wulandjani, H., Widiyanseno, B., Utomo, E., N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.